

**IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
DI KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**

Disusun oleh

HARDIYANTI

Nomor Stambuk : 10561 05492 15



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
DI KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

HARDIYANTI

Nomor Stamuk : 10561 05495 15

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Hardiyanti

Nomor Stambuk : 10561 05492 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Abdul Kadir Adys, S.H. M.M



Dr. Sudarmi, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si



Nasrul Haq, S.Sos. M.Pa

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan mengujujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor :0042/FSP/A.4-II/VII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari jum'at tanggal 09 agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si

Dr.Burhanuddin. S.Sos.,M.Si

Penguji :

1. Dr. H. MuhlisMadani, M.Si (Ketua)

2. Dr.Hj. Sudarmin, M.Si

3. Haerana, S.Sos., M.Pd

4. NurbiahTahir, S.Sos., M.AP

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Hardiyanti

Nomor Stambuk : 10561 05492 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 Juni 2019

Yang Menyatakan,



Hardiyanti

ABSTRAK

HARDIYANTI, Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Abdul Kadir Adys dan Sudarmi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat. Bagaimana ketepatan program KUR dalam mencapai tujuan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan UMKM.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai Implementasi Program kredit Usaha Rakyat Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dimana penulis mewawancarai 9 orang, sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan maupun arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program kredit usaha rakyat berhasil berjalan dengan baik dengan bukti bahwa adanya kepuasan masyarakat yang tercapai dalam program kredit usaha rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan pada kualitas pelayanan sudah berjalan dengan baik sebagaimana prosedur yang sudah berlaku walaupun ada sedikit yang musti dibenahi agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih maksimal, namun terlepas dari itu masyarakat sudah merasa puas dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat.

Kata Kunci : Implementasi Program Kredit usaha Rakyat (KUR)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Alla SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Program Kredit usaha Rakyat Di kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Abdul Kadir Adys, S.H. M.M selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sudarni, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos. M.Pa selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Kedua orang tua saya yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat baik moril ataupun materil dan senantiasa mendoakan disetiap langkah kakiku.

5. Kepada kedua kakak laki-laki saya terima kasih sudah selalu memberikan support kepada saya serta selalu memenuhi kebutuhan saya selama saya berkuliah.
6. Kepada adik bungsu terima kasih sudah menemani saya disetiap penelitian yang saya lakukan karena tanpa kamu mungkin saya agak kewalahan dalam mengambil dokumentasi foto bersama informan saya.
7. Kepada SPT tidak lupa saya ucapkan terima kasih karena saya selalu merepotkan untuk menemani dan mengantar saya disetiap bimbingan serta terima kasih juga untuk dukungannya selama ini.
8. Kepada Tika teman sekamarku, terimakasih juga karena sudah beberapa kali meminjamkan printnya untuk saya mengerjakan skripsi.
9. Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada EKG, berkat doa dan support kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 17 Juni 2018



Hardiyanti

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan TIM	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	8
B. Konsep Program Kredit Usaha Rakyat	13
1. Program Kredit Usaha Rakyat	16
2. Penilaian Kredit Usaha Rakyat	18
3. Resiko Kredit Usaha Rakyat	19
4. Macam-macam Kredit Usaha Rakyat	20
5. Sasaran Program Kredit Usaha Rakyat	22
6. Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat	23
C. Kerangka Pikir	23
D. Fokus Penelitian	24
E. Deskripsi Fokus Penelitian	24
BAB III. METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Informan Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	32
G. Teknik Pengabsahan Data	33

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	35
1. Kondisi Geografis Kabupaten Enrekang	35
2. Kecamatan Alla	38
3. BRI Unit Kalosi	42
B. Hasi Penelitian Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat	48
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program KUR	66
1. Faktor Pendukung Implementasi Program	67
2. Faktor Penghambat Implementasi Program	69
D. Pembahasan Implementasi Progam Kredit Usaha Rakyat	70
BAB V. PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77



DAFTAR TABEL

3.1 Informan Penelitian.....	29
4.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan dan jumlah Desa Tiap Kecamatan di Kabupaten Enrekang.....	36
4.2 Keadaan Wilayah Kabupaten Enrekang Berdasarkan Tingkat Kelerengan....	37
4.3 jumlah Penerima KUR Di Kecamatan Alla Tiga tahun Terakhir	49
4.4 Nominal Dana KUR yang Cair 3 Tahun Terakhir	51
4.5 Kolektibilitas Pinjaman Dana kredit Usaha Rakyat	55
4.6 Jumlah Pencapaian Target Dana Penyaluran KUR	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berkembang yang saat ini gencar-gencarnya melangsungkan pembangunan dalam berbagai bidang yang berpedoman pada undang-undang Dasar 1945 alinea ke-empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, karenanya sering terdengar di telinga kita istilah pembangunan oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi yang baik untuk berkembang, namun seiring perkembangannya memiliki permasalahan keuangan yang cukup pelik dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya.

Yang menjadi salah satu masalah besar dalam proses pembangunan di Indonesia adalah masalah kemiskinan dimana tingkat kemiskinan di Indonesia yang sangat tinggi sehingga berpengaruh besar dalam proses pembangunan. Kemiskinan menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Maka dari itu berbagai kebijakan pemerintah dari berbagai program pembangunan yang inklusif terus digencarkan pemerintah agar jarak antara yang kaya dan yang miskin bisa dikendalikan. Walaupun kemiskinan masih menjadi masalah pokok

yang mempengaruhi kemajuan serta peningkatan dari berbagai pembangunan di Indonesia.

Banyak faktor penyebab kemiskinan. Diantara faktor tersebut adalah rendahnya tingkat kemampuan serta pengetahuan, kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah sehingga banyak orang menjadi pengangguran tanpa berpenghasilan, tingginya jumlah angka kelahiran dan lain-lain.

(Wanggai:2012) mengemukakan bahwa intervensi pengurangan kemiskinan oleh pemerintah, dikelompokkan dalam tiga gugus yaitu :

1. Gugus pertama, yakni bantuan sosial berbasis keluarga. Dalam hal ini seperti bantuan sosial masyarakat, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), program keluarga harapan (PKH) serta bantuan sosial lainnya dan langkah-langkah subsidi lainnya yang langsung menyentuh masyarakat secara langsung.
2. Gugus kedua, didalamnya terdapat intervensi pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
3. Gugus ketiga yakni program pengembangan ekonomi lokal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Kecil (KUK), dan berbagai program lainnya.

Program-program diatas telah dan terus dilakukan oleh pemerintah sebagai realisasi pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian kemiskinan masih menjadi penghambat yang paling besar dalam proses pembangunan di Indonesia.

Salah satu yang menjadi program dalam pengembangan ekonomi lokal untuk masyarakat dari pemerintah adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program ini diharapkan mampu meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di Indonesia UMKM sudah menjadi bagian yang sangat urgen dari sistem perekonomian di Indonesia, hal ini disebabkan karena UMKM merupakan unit usaha yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan usaha lain yang berskala besar serta memiliki keutamaan dalam menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Program KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007, Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Reformasi Sektor Keuangan. Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan ditanda tangannya Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/ MoU) antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah beberapa dengan addendum ke IV pada tanggal 10 Januari 2012 Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Aditya Wardhana dan Zainuddin Iba| Analisis Kinerja Implementasi Program KUR)

Melalui program KUR, pemerintah mengharapkan adanya percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Pemerintah Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Permenko ini

merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai 1 januari 2018. Adapun perubahan kebijakan KUR yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9% menjadi 7% efektif pertahun, kelompok usaha sebagai calon penerima KUR, skema KUR khusus, skema KUR multisektor, pengaturan minimum porsi dan grace periode, perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil, plafon KUR mikro sektor produksi dan diluar sektor produksi, penyaluran KUR bersama dengan kredit lain yang diperbolehkan, struktur biaya KUR penempatan TKI, KUR untuk masyarakat daerah perbatasan, KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Penyaluran pola Kredit Usaha Rakyat ditujukan pada beberapa usaha seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit usaha rakyat ini ditujukan dalam membantu ekonomi usaha masyarakat kecil dengan cara memberikan pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Dalam diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentunya musti mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat, Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Kecil Mataram (Asperam) Yogyakarta, Budi Sarwono, mengatakan program itu mestinya

disosialisasikan secara luas agar pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak pernah mengenal akses bank mampu memanfaatkan KUR.

Sosialisasi mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harusnya sangat gencar-gencarnya dilakukan oleh perbankan dalam hal ini karyawan Bank BRI Unit Kalosi agar masyarakat di wilayah Kecamatan Alla lebih mengenal dan bahkan menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam melancarkan setiap usaha yang dilakukan, mengingat mayoritas masyarakat di Kecamatan Alla memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani dan pedagang pasar.

Namun Praktiknya Sosialisasi program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang oleh Bank BRI Unit Kalosi sebagai pelaksana program itu sampai kini dinilai belum maksimal sehingga tidak banyak pelaku usaha mikro dan kecil khususnya para petani dan pedagang yang mengetahui program tersebut, belum adanya pemahaman yang seragam tentang biaya KUR bagi masyarakat serta masih banyak penyimpangan dan persepsi yang keliru tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya tentang ketentuan anjungan (jaminan) persyaratan administrasi sering terjadi kredit macet.

Berbagai fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dapat dijadikan dasar awal peneliti untuk menganalisis lebih mendalam akan Implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang agar implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa depan lebih meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang secara berkelanjutan.

Melalui pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka judul penelitian ini adalah “Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi program Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Kredit usaha Rakyat (KUR) di kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa landasan teoritis bagi perkembangan ilmu Administrasi Negara pada umumnya, dan dapat memberikan pemahaman secara teoritis terhadap

bagaimana proses Implementasi program Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pelaku UMKM yang tidak mempunyai jaminan/anjungan akan tetapi membutuhkan modal untuk usahanya agar bisa mendapatkan kredit usaha rakyat oleh Bank lewat lembaga penjaminan. Serta penelitian ini juga diharapkan agar dapat memberikan kontribusi kepada bank dan lembaga penjaminan untuk selalu membantu pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya dan dapat menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan untuk rakyat khususnya masyarakat di Kecamatan Alla.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pengertian Implementasi Menurut Westra dalam (Rahardjo:2011) adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, serta dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, dalam (Rahardjo:2011) Pengertian Implementasi ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Siagian S.P dalam (Rahardjo:2011) mengemukakan bahwa Pengertian Implementasi merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif.

Kemudian SP. Siagian, mengemukakan bahwasannya jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achivement orinted*” telah dirumuskan maka kini tinggal implementasinya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam implementasi ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.

2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan dengan pembagian tugas-tugas dan disertai sumber-sumber.
3. Monitor artinya implementasi dan kemajuan implementasi tugas jangan sampai akan terjadi sesuatu hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan semua hasil-hasil pelaksanaan suatu kegiatan, analisis implementasi tugas-tugas, kemudian pemeriksaan kembali dan disertai dengan penyusunan dan jadwal waktu implementasi selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Mengenai implementasi, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa yang perlu diimplementasikan, dalam lingkup administrasi Negara sesuatu yang diimplementasikan adalah suatu kebijakan. Kebijakan dalam artian ini bisa berupa ketetapan MPR, Undang-Undang, Keputusan Menteri, PERDA, dan berbagai keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara atau daerah baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dalam Implementasi kebijakan dewasa ini telah diidentifikasi bahwa banyaknya masalah yang timbul. Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang relatif rumit dan menyeluruh. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor, baik yang menyangkut tentang karakteristik program kebijakan maupun oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemerintah. (Winarno, 2002)

Kebijakan apa saja sebenarnya memiliki resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn dalam (Wahab:2002) membagi pengertian kegagalan suatu kebijakan ke dalam dua kategori yaitu, tidak terimplementasi dan implementasi yang tidak berhasil . Tidak terimplementasi maksudnya yaitu suatu kebijakan pemerintah tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati sebelumnya, mungkin disebabkan karena pihak yang terlibat tidak ingin bekerjasama, atau mereka bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau tidak ikhlas, atau karena bisa saja mereka tidak sepenuhnya menguasai atau mengetahui apa yang menjadi permasalahan, atau mungkin saja masalah yang ditangani diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapa gigihnya usaha mereka, hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi, sehingga mengakibatkan implementasi program yang efektif susah untuk dipenuhi. Sedangkan, implementasi yang tidak berhasil itu biasanya terjadi apabila kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, namun terkendala lagi oleh kondisi misalnya, terjadi suatu peristiwa pergantian kedudukan jabatan atau kekuasaan kekuasaan, bencana alam dan lain sebagainya.

kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil yang diinginkan. Biasanya kebijakan yang mempunyai resiko gagal, disebabkan karena adanya faktor – faktor yaitu Pelaksanaannya jelek (bad execution), kebijakannya memang jelek (bad policy) atau memang kebijakannya itu bernasib jelek (bad luck). Pelaksanaan kebijakan bisa mengalami kegagalan atau bahkan tidak membuahkan hasil, itu disebabkan karena beberapa hal diantaranya a.) Teori yang menjadi suatu dasar kebijakan yang tepat, oleh karenanya musti dilakukan

“Reformulasi kebijakan“, b.) Sarana yang dipilih dalam implementasinya tidak efektif, c.) penggunaan sarana dan prasarana yang tidak semestinya, d.) Isi dari sebuah kebijakan samar – samar, e.) Tidak adanya kepastian dari faktor intern ataupun faktor ekstern, f.) Kebijakan yang sudah ditetapkan mempunyai banyak cela, g.) Dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan masalah-masalah teknis, h.) kurangnya ketersediaan sumber– sumber pembantu waktu, materi, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan dari hal–hal yang menjadi menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan, maka dapatlah diketahui bahwasannya sejak dalam pembuatan kebijakan tentunya tidak selalu disebabkan karena kelemahan atau ketidakmampuan dari pihak pelaksana atau administrator, namun juga dapat disebabkan karena pembentukan kebijakannya yang kurang sempurna. Di sini menjadi peran penting yang dimainkan pelaksana kebijakan serta musti mampu mengambil langkah–langkah atau tindakan untuk mendorong adanya “reformulation“ sehingga kebijakan pokok dapat tercapai. Implementasi kebijakan yang berhasil menjadi faktor penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Untuk memperbaiki implementasi kebijakan, ada beberapa langkah yang musti dilakukan yakni : a.) Dalam mengajukan langkah–langkah perbaikan musti dipahami lebih dahulu apa yang menjadi hambatan–hambatan yang nantinya muncul dalam proses implementasi dan apa yang menyebabkan hambatan tersebut muncul, b.) mengubah keadaan yang menyebabkan faktor penghambat tersebut.

Selain faktor penghambat yang menjadi Implementasi kebijakan, juga ada faktor pendukung Implementasi suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh (Soenarko:2000) yaitu sebagai berikut : a.) Persetujuan, dukungan serta kepercayaan masyarakat b,) Isi serta tujuan kebijakan musti dimengerti dan dipahami secara jelas terlebih dahulu apa maksudnya. c,) Implementasi haruslah memiliki informasi yang cukup, terutama tentang kondisi serta kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran, d,) Pembagian kerja yang dilakukan secara efektif dalam pelaksanaan kebijakan, e,) Pembagian kekuasaan atau wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan. f.) Pembagian tugas atau kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Hal tersebut senada dengan penjelasan bahwa kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan memiliki dampak yang positif bagi para anggota masyarakat. Dengan kata lain, perbuatan manusia yang menjadi masyarakat yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari pemerintah atau negara. Dengan demikian, jika tidak bertindak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah atau negara, maka kebijakan negara menjadi tidak efektif. Selain itu untuk mencapai efektivitas implementasi kebijakan, komunikasi yang baik harus disebarluaskan kepada masyarakat.

B. Konsep Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program adalah urutan, serta langkah, bahkan prosedur atau tindakan yang musti dilakukan secara sistematis, berencana dalam kurun waktu tertentu dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Bagi pemerintah, program sangatlah berpengaruh bahkan sering kali program disamakan dengan kegiatan-kegiatan

proyek dalam pembangunan di daerah. Pada program didalamnya terdapat semua kegiatan-kegiatan yang bisa dijadikan patokan atau rujukan dalam pelaksanaan proyek, baik yang menyanggung manajemen keuangan, operasional sampai pada tahap pengendalian secara evaluasi.

(Winarno:2002), mengenai kinerja kebijakan mengemukakan kriteria implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *efektive* yang memiliki arti dicapainya keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas seringkali terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, apabila pencapaian tujuan pada organisasi semakin besar, maka semakin besar juga efektivitasnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan yang besar pada organisasi dapat menyebabkan semakin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Namun apabila implementasi kegiatan kebijakan publik dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan kebijakan tersebut telah gagal.

(Nugroho:2015) Mengungkapkan Efektivitas adalah bentuk daya guna dan tepat guna yang sudah dilakukan. Berdaya guna maksudnya suatu yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan secara kualitas. Daya guna lebih kepada

kualitas output yang dihasilkan dari kinerja aparatur. Sementara tepat guna adalah penyelesaian terhadap pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

b. Efisiensi

Efisiensi menurut merupakan persamaan dari rasionlitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya di ukur dari ongkos moneter.

Secara umum, dari pengertian efisiensi adalah sebuah ukuran keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan atas besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang ingin di capai. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang nantinya diinginkan maka dapat dikatakan bahwa prosesnya sudah efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika terdapat perbaikan pada prosesnya, misalkan prosesnya menjadi lebih cepat atau lebih murah. Efisiensi merupakan bentuk pencapaian yang maksimal terhadap hasil kerja dengan menggunakan sumber daya minimal. Sumber-sumber daya dapat dilakukan seminimal mungkin dengan pencapaian hasil kerja yang maksimal adalah bentuk kinerja yang efisien.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai tujuan yang telah dicapai telah dirasakan mencukupi dalam berbagai aspek. Kecukupan maksudnya adalah seberapa jauh tingkat efektifitas memuaskan nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang nantinya menumbuhkan adanya masalah. Sebelum suatu produk tentang kebijakan akan disahkan atau dilaksanakan musti ada kesesuaian antara metode yang akan dilaksanakan dengan suatu sasaran yang akan nantinya dicapai.

Disitu akan diketahui apakah cara atau prosedur yang dilakukan sudah sesuai atau malahan menyalahi aturan atau bahkan teknik pelaksanaannya yang sudah benar.

d. Pemerataan

Perataan merupakan suatu keadilan yang diberikan atau diperoleh oleh sasaran dari kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada perataan merupakan kebijakan yang hasil usahanya secara adil didistribusikan. Suatu kebijakan mungkin dapat efektif, efisien dan merata. Inti atau kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

e. Responsivitas

Responsifitas dapat diartikan sebagai Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan suatu organisasi untuk mengidentifikasi suatu kebutuhan masyarakat, penyusunan prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas maksudnya mengukur daya tanggap suatu organisasi terhadap harapan, keinginan dan bahkan dari aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan (Agus Dwiyanto :2006).

Responsivitas adalah kemampuan provider dalam mengenali sebuah kebutuhan masyarakat, menyusun suatu agenda dan prioritas pelayanan, serta dapat mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat, dapat diartikan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap provider terhadap apa yang menjadi harapan, keinginan dan bahkan aspirasi serta tuntutan customers (Ratminto & Winarsih,2005)

Responsivitas pelayanan publik merupakan tanggapan dari pemberi layanan terhadap umpan balik yang diberikan oleh masyarakat terkait pelayanan yang

diterima. Responsivitas perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik, mengingat dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan, pemerintah harus mendengar kebutuhan dan keluhan warga Negara yang diberikan layanan sebagai bahan evaluasi. Masalah dan keluhan tersebut kemudian direspon dengan tepat dan secepat mungkin.

f. Ketepatan

Ketepatan tepatnya merujuk pada nilai dari tujuan program serta pada kuatnya pendapat yang melandasi tujuan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah suatu hasil dari semua alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan dari tujuan yang layak.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan implementasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap Implementasi program dari kebijakan pemerintah dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan implementasi kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut.

1. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Istilah kredit, mulanya berasal dari bahasa latin yaitu “credere” yang memiliki arti kepercayaan atau “credo” yang memiliki arti saya percaya. Namun, secara umum, kredit dalam kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kredit yaitu Penyediaan finansial berupa uang ataupun tagihan atau yang dapat

disamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, sehingga mewajibkan dari pihak peminjam untuk melakukan dengan jumlah bunga sebagai imbalannya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR), merupakan kredit ataupun pembiayaan yang diberikan dari pihak perbankan kepada UMKM yang feasible tetapi belum bankable. Maksudnya adalah, usaha itu memiliki prospek di bidang bisnis yang dapat dikatakan baik, dan memiliki kemampuan dalam mengembalikannya. UMKM serta Koperasi diharapkan mampu dalam mengakses. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah yang bergerak disektor usaha produktif diantaranya: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah merupakan program rancangan pemerintah tetapi sumber dana keseluruhan berasal dari pihak bank. Pemerintah, memberikan penjaminan terhadap resiko dari KUR sebanyak 70% , kemudian sisanya yang berjumlah 30% ditanggung sepenuhnya oleh bank pelaksana. Penjamian KUR diberikan dalam rangka untuk mendorong dalam pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh bank pelaksana yaitu BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, BTN, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 135/PMK.05/2008, tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah “Kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja suatu bahkan investasi dengan didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”. UMKM-K yang dimaksud adalah usaha

produktif yang layak, yaitu apabila hasil usaha yang didapatkan diperkirakan mampu dalam membayar pinjaman dan bunga hingga lunas. “Usaha dapat dikatakan feasibel tetapi belum bankable maksudnya yaitu usahanya sudah berjalan tetapi masih mempunyai keterkendalaan dalam memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank)” (Malano:2011).

2. Penilaian Kredit Usaha rakyat (KUR)

Sebelum pemberian kredit kepada calon debitur kepada pelaku usaha, pihak bank musti yakin dan percaya bahwa calon debitur dapat dipercaya sehingga pihak bank harus melakukan penilaian atau persyaratan kredit. Diantara yang menjadi persyaratan pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon debitur yaitu sebagai berikut:

a. Mempunyai Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Dimana Fotocopy Kartu Tanda Keluarga menjadi persyaratan yang dapat diterima oleh bank karena dengan adanya fotocopy KTP memberikan tanda bahwa calon debitur benar-benar warga yang resmi.

b. Mempunyai Surat Izin Usaha

Surat izin usaha merupakan persyaratan lain yang digunakan, dimana surat izin usaha dibuat dan dikeluarkan oleh Kelurahan. Namun pada saat pengambilan kredit, Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) terjun langsung ke lokasi atau yang menjadi tempat usaha berada untuk memberikan bukti yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

c. Mempunyai Foto Copy Kartu Keluarga (KK)

Foto copy kartu keluarga (KK) memiliki fungsi yang sama dengan penggunaan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP). Fotocopy kartu keluarga dibutuhkan untuk melihat data yang lebih failed tentang calon debitur, sehingga Bank lebih percaya dengan calon debitur.

3. Risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR)

(Ghozali:2007) mengartikan risiko kredit merupakan risiko yang terjadi disebabkan karena tidak adanya kepastian atau terjadi kegagalan usaha (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.

Program Kredit Usaha Rakyat masih menjadi ujung tombak kekuatan pemerintah untuk perluasan akses pembiayaan atas usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini sudah berjalan selama satu dekade, program ini sudah berhasil diberikan kepada setidaknya 16 juta penerima kredit. Agresivitas program KUR tercermin pada jumlah kontrak kredit dan nantinya yang dapat dicairkan yaitu sebesar 24 juta kontrak kredit dengan nilai KUR yang disalurkan kepada masyarakat yaitu sebesar Rp 447,5 Triliun. Kinerja penyaluran program KUR kepada pelaku usaha yang baik, juga diikuti oleh terjaganya kualitas KUR yang diberikan, hal tersebut dibuktikan dengan terpeliharanya rata – rata tingkat *Non Performing Loan*(NPL) KUR, Skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebanyak 3,3%, sedangkan rata – rata NPL KUR Skema Subsidi Bunga, sampai pada April 2018 sebanyak 1,06%. Suatu pencapaian yang amat sangat positif ditengah-tengah ketidakstabilan kondisi perekonomian nasional bahkan gejolak politik hingga pada pergantian kursi kepemimpinan nasional.

Dalam perjalanannya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah berubah menjadi kredit program dengan rancangan yang sesuai dengan yang dibutuhkan usaha mikro, kecil serta tetap sasaran dalam penyalurannya. Hal ini tercermin atas munculnya beberapa kerangka pembiayaan atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan TKI menjadi solusi utama pembiayaan bagi para calon tenaga kerja Indonesia yang rencananya akan bekerja di luar negeri, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus yang mengakomodir seluruh kebutuhan pembiayaan bagi bidang perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dalam upaya mendukung atas ketepatan sasaran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah sudah membuat Sistem Informasi Kredit Program, merupakan suatu sistem yang diproyeksi sehingga berbasis data nasional usaha mikro, kecil, dan bahkan menengah. Sistem ini telah dirancang sejak dari akhir tahun 2014, sehingga menjadi alat pemerintah dalam memastikan tepat sasarnya penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta dapat membantu pemerintah untuk membayar subsidi bunga tepat waktu dan bahkan tepat jumlah.

4. Macam-Macam Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Telah banyak tipe peminjaman yang telah dikeluarkan pemerintah untuk memajukan usaha rakyat ini. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri juga salah satu program utamanya. Dengan kerjasama dengan berbagai bank terkemuka, pemerintah telah membuka sarana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di beberapa bank konvensional yang tidak asing di telinga kita seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Mandiri.

a. KUR Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Sebagai dukungan untuk para pengusaha Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan beberapa tipe Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI. Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI dapat menyediakan peminjaman sampai 500 juta rupiah dengan suku bunga 0,41% per bulannya.

b. KUR Bank Negara Indonesia (BNI)

Bank Negara Indonesia (BNI) juga menawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersendiri yang dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Linkage. Dengan proses yang cepat dan mudah, Bank Negara Indonesia (BNI) menawarkan bunga ringan sebesar 9% per tahunnya. Anda juga tidak perlu khawatir dengan dokumen, Bank Negara Indonesia (BNI) dapat juga menawarkan pembiayaan khusus untuk usaha Anda yang feasible namun belum memiliki agungan sesuai persyaratan bank.

c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri

Tidak kalah dengan yang bank lainnya, Mandiri juga tawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terbagi menjadi dua bagian sesuai penggunaannya yaitu Cash Loan atau peminjaman uang tunai dan Non-Cash Loan atau peminjaman uang non-tunai.

5. Sasaran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dilihat dari sisi kelembagaan, sasaran dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu adalah usaha Mikro, Kecil, Menengah dan bahkan Koperasi (UMKM). Dan untuk bidang usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah semua usaha sektor produktif. Berikut penjelasannya

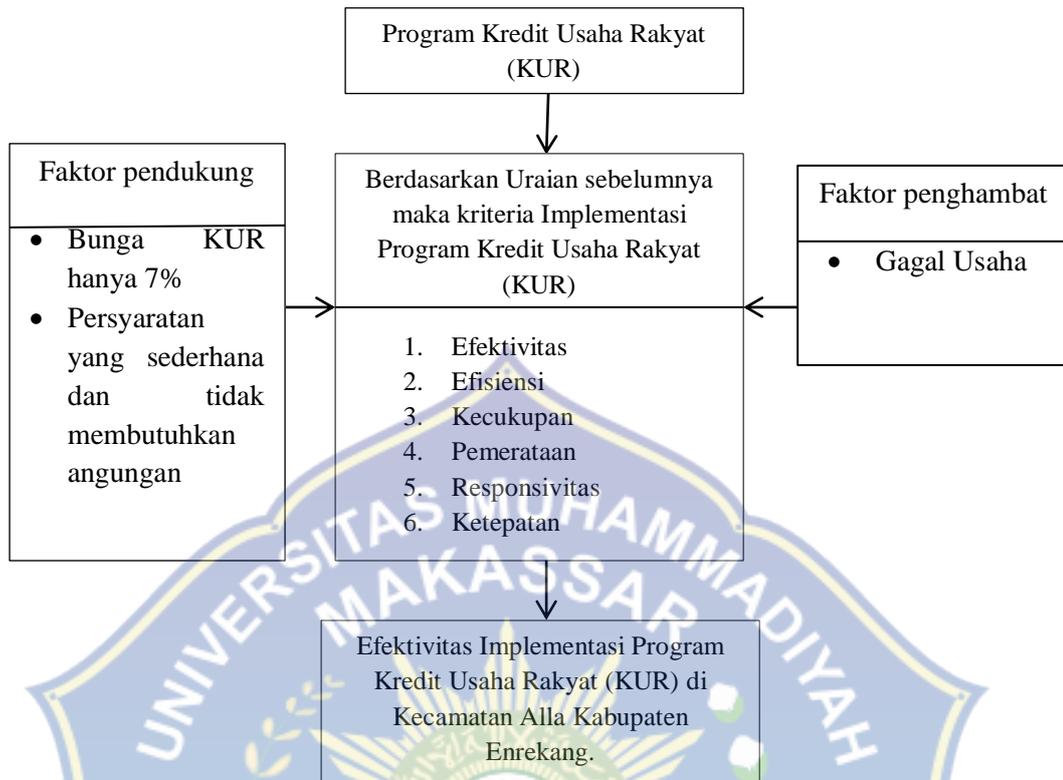
1. Usaha Mikro yaitu, usaha yang menjadi milik perorangan ataupun badan usaha yang dikelola secara perorangan dengan memiliki kriteria yaitu memiliki kekayaan maksimal Rp 50 juta (ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat mendirikan usaha) atau bisa juga apabila memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300 Juta.
2. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan secara perorangan ataupun badan usaha yang tidak termasuk dalam anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, bisa juga menjadi bagian baik langsung bahkan tidak langsung dari Usaha besar atau menengah.
3. Usaha menengah adalah usaha produktif berdiri sendiri. Dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha yang tidak merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
4. Koperasi adalah badan usaha yang didalamnya beranggotakan seorang atau bisa juga badan hukum berupa koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus bisa juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.

6. Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki tujuan yaitu untuk mempercepat pengembangan sektor nyata atau riil dan juga memberdayakan usaha dalam skala kecil, untuk meningkatkan akses terhadap kredit bahkan lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperluas kesempatan kerja.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berdasarkan teori tentang Implementasi kebijakan oleh Winarno yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kebijakan implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dipengaruhi oleh enam kriteria yaitu : a.) efektivitas, b.) efisiensi, c.) kecukupan, d.) pemerataan, e.) responsivitas, f.) ketepatan serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi. Kemudian untuk menganalisa Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Maka dari itu kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai gambar berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian

D. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Dengan mengacu pada beberapa indikator hasil kebijakan yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan ketepatan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Implementasi, merupakan pelaksanaan kebijakan Kredit Usaha Rakyat dari pemerintah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki usaha

dengan maksud untuk memberikan bantuan berupa modal untuk kelangsungan usaha agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

2. Efektivitas, merupakan capaian atau hasil yang didapatkan dari Implementasi Program kredit Usaha Rakyat di kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
3. Efisiensi, merupakan usaha yang dilaksanakan secara baik seperti tidak memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan dalam Implementasi dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
4. Kecukupan, yaitu berhubungan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas dengan kebutuhan, dan memberikan pelayanan yang baik dan maksimal dalam menjalankan Kredit Usaha Rakyat (KUR), di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
5. Pemerataan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan rasional sosial dengan fasilitas, pelayanan yang standar dengan adil, serta pelayanan yang sesuai dengan prosedur dalam Implementasi dari Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
6. Responsivitas, yaitu tanggapan pegawai Bank BRI Unit kalosi yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat ataupun pelayanan pegawai sesuai dengan respon masyarakat peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR), di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
7. Ketepatan, yaitu berhubungan dengan ketepatan waktu, ketepatan sasaran pemberian KUR kepada masyarakat di kecamatan Alla serta ketepatan kinerja dalam pemberian pelayanan oleh Pegawai Bank BRI Unit Kalosi

kepada masyarakat peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR), di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

8. Faktor pendukung, yaitu faktor yang mendukung dari bagaimana Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
9. Faktor penghambat, yaitu faktor yang dapat menghambat dari Implementasi program kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla kabupaten Enrekang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dilakukan penulis dalam penelitian ini selama 2 bulan yaitu dari tanggal 29 April sampai 27 Juni 2019 lokasi penelitian ini berada di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kalosi dan Kantor Camat Alla. Dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Alasan peneliti memilih lokasi di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kalosi karena hanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kalosi satu-satunya Bank di Kecamatan Alla yang menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

B. Jenis dan tipe penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan masalah atau bahkan keadaan bahkan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkapkan fakta yang diperoleh di lapangan dan memberikan gambaran secara objektif mengenai apa yang terjadi sebenarnya dari objek yang diteliti.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi. Yaitu penelitian yang dilakukang dengan berangkat langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati fenomena yang terjadi di lapangan secara alamiah.

C. Sumber Data

Data merupakan catatan dari kumpulan fakta. Dalam keilmuan, fakta dikumpulkan untuk kemudian menjadi data. Kemudian data diolah sehingga dapat dipaparkan secara jelas dan dengan tepat sehingga dapat dipahami oleh orang lain yang secara tidak langsung mengalami. Sumber data dari penelitian ini terdiri atas data primer serta data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari sumber yang asli atau yang pertama. Data ini diperoleh melalui narasumber atau informan atau dalam istilah lain responden, yaitu merupakan orang yang dijadikan dan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data di lokasi tempat meneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya mendukung dari keperluan dari data primer seperti halnya dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

D. Informan penelitian

Informan bisa juga dikatakan sebagai orang yang berada di ruang lingkup penelitian, maksudnya yaitu orang yang nantinya dapat memberikan informasi atau data mengenai situasi dan kondisi dari objek yang penelitian. Penentuan narasumber atau informan untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara peneliti memilih peran tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan serta informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pihak

yang terkait sebagai partisipan dalam Implementasi dari Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Yang ditentukan dengan informan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Syafirullah	SY	Ketua BRI Unit Kalosi	1 orang
2	Hanapi	H	Camat Alla	1 orang
3	Faud Agus	FA	Mantri KUR	1 orang
4	Firman Liling	FL	Mantri KUR	1 orang
5	Mustafa	M	Masyarakat Pengguna KUR	1 orang
6	Nuraini	N	Masyarakat Pengguna KUR	1 orang
7	Yusuf	Y	Masyarakat Pengguna KUR	1 orang
8	Aco	A	Masyarakat Pengguna KUR	1 orang
9	Wangka	W	Masyarakat Pengguna KUR	1 orang
Jumlah Keseluruhan Informan				9 orang

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Pengamatan yang pertama kali saya lakukan yaitu di sekitaran Kecamatan Alla. Saya mengamati di sekitar kantor BRI Unit Kalosi disana ada banyak bangunan yang berjejer disampingnya kemudian di samping kiri ada kantor

Polsek Alla dan di depan kantor BRI Unit terdapat jalan poros Enrekang Toraja. Disini saya mulai mengamati ternyata didepan kantor BRI Unit Kalosi ada spanduk tentang KUR yang sangat besar. Selain itu pengamatan juga saya lakukan di kantor Camat Alla, didepan kantor camat ada rujab kecamatan tetapi dialihkan fungsi menjadi tempat kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), disamping kanan Kantor Camat terdapat Kantor Kelurahan dan TK Pertiwi. Disini saya mulai mengamati bahwa pada saat membuat surat izin usaha untuk keperluan persyaratan pengambilan KUR yang dilakukan di kantor kelurahan nantinya akan dibawa lagi ke kecamatan untuk mendapatkan persetujuan atau tandatangan camat.

2. Wawancara

Wawancara yang telah saya lakukan yaitu melibatkan beberapa pegawai kantor Bank BRI Unit Kalosi. Pada awalnya saya ingin mengetahui pendapat para pegawai BRI Unit kalosi bahwa sampai dimana hasil kinerja mereka di tahun kemarin apakah di setiap kinerjanya tentang penyaluran KUR ke masyarakat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan para pengguna KUR, setelah saya sudah mengamati di setiap kantor ternyata sudah berjalan sebagaimana mestinya dan yang lebih menarik lagi adalah pada mantri KUR turun langsung ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

selain itu wawancara juga saya lakukan dengan Camat Alla dari wawancara tersebut saya ingin mengetahui bahwa sampai dimana kinerja pemerintah kecamatan dalam pengimplemetasian KUR di Kecamatan Alla dan dari wawancara yang saya terima dari Camat Alla mengatakan bahwa pihak

kecamatan tidak memiliki sangkut paut tentang penyaluran KUR kepada masyarakat karena itu semua sudah menjadi kewenangan pihak Bank, namun pihak Kecamatan memiliki wewenang untuk membuat surat izin usaha untuk dijadikan persyaratan pengambilan KUR di Bank.

Selanjutnya saya melanjutkan wawancara dengan turun langsung ke masyarakat guna untuk mengetahui bagaimana pelayanan dari program kredit usaha rakyat apakah dengan adanya kebijakan tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah masyarakat merasa senang dan merasa sangat dibantu. Dan ternyata dari masyarakat yang saya wawancarai sangat menyambut baik dengan adanya program KUR ini, mereka sangat bersyukur dan merasa terbantu dalam mengembangkan usaha yang dimiliki dengan adanya kebijakan dari pemerintah ini, walaupun ada segelintir orang yang masih kurang puas dengan bunga yang diberikan dan menginginkan agar Bunga tersebut di turunkan lagi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang saya lakukan di lokasi penelitian tidaklah terlalu banyak hanya saja dokumentasi yang bermanfaat di sekeliling Kantor Bank BRI Unit Kalosi dan Kantor Camat Alla. Dokumentasi tersebut saya dapatkan tentunya melalui izin dari pihak kantor, selain itu saya mengambil sebagian dokumentasi yang saya butuhkan seperti bagan atau struktur organisasi serta dokumen-dokumen yang ada di kantor.

Selanjutnya dokumentasi yang saya lakukan dengan berfoto bersama Ketua BRI Unit Kalosi dan staf Kecamatan Alla pada saat pengambilan dokumen, namun saya tidak sempat mendapatkan foto bersama Camat Alla dikarenakan

beliau sangat sibuk. Dokumentasi dengan berfoto ini saya lakukan sebagai bukti bahwa saya benar-benar melakukan penelitian di lokasi.

F. Teknik analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung, dan sudah selesai pengumpulan data pada kurun waktu tertentu. Tentunya Pada saat wawancara berlangsung, peneliti telah melakukan analisa terhadap apa yang menjadi jawaban dari pihak yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisa, namun masih terasa belum memuaskan bagi peneliti, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu atau dirasa sudah memuaskan, barulah diperoleh data yang dianggap kredibel.

Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu:

1. Reduksi data

reduksi data juga memiliki arti yaitu merangkum, memulih hal pokok yang dianggap penting dan dibutuhkan sehingga data yang sudah reduksi dapat memberikan gambaran yang jelas, serta mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

2. Penyajian data

Setelah mereduksi data, selanjutnya langkah yang dilakukan adalah penyajian data, langkah selanjutnya yaitu dimana penyajian data merupakan penyusunan informasi sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan yang diperoleh peneliti pada tahap awal masih bersifat sementara, dan masih akan berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetap jika kesimpulan yang dikemukakan peneliti pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel atau dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penarikan kesimpulan data yang telah di analisis dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan.

G. Teknik Pengabsahan Data

Setelah menganalisis data peneliti musti memastikan apakah temuan penelitian yang dilakukan sudah akurat. Kredibilitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karna itu sangat diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data lebih akurat agar hasilnya memuaskan. Menurut Sugiono (2013) triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan waktu pada waktu yang berbeda yaitu:

1. Triangulasi waktu

Apabila hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber dianggap belum memuaskan maka peneliti dapat melakukan wawancara pada waktu yang berbeda tergantung situasi dan kondisi dari narasumber.

2. Triangulasi sumber

Yaitu dari mana peneliti mendapatkan data, disini bisa berupa hasil wawancara bisa juga dokumen, bisa juga data yang diperoleh berasal dari orang yang berbeda

3. Triangulasi teknik

Yaitu berupa teknik yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan informasi dari narasumber, apabila narasumber yang ingin dimintai keterangan tentang sesuatu yang diteliti dalam keadaan sibuk dan tidak bisa melakukan wawancara maka peneliti bisa menuliskan saja daftar pertanyaan kepada narasumber untuk nantinya di jawab.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 236 km sebelah utara dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Makassar. Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak di antara koordinat $3^{\circ}14'36''$ - $30^{\circ}50'00''$ LS dan antara $119^{\circ}40'53''$ - $120^{\circ}06'33''$ BT. Daerah ini terletak pada ketinggian 47-3.239 meter dpi, dengan luas wilayah sekitar 1.786,01 km².

Secara administratif wilayah Kabupaten Enrekang berbatasan dengan empat Kabupaten yaitu:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
2. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Administrasi pemerintah Kabupaten Enrekang terbagi atas 12 Kecamatan yang terdiri atas 112 yaitu 17 kelurahan dan 95 Desa. Luas wilayah masing-masing kecamatan dan presentase terhadap luas wilayah Kabupaten Enrekang secara keseluruhan, dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan tiap Kecamatan di Kabupaten Enrekang.

NO	Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase %	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Maiwa	393	22.00	12
2	Enrekang	29	1.62	15
3	Baraka	159	8.90	20
4	Anggeraja	125	6.99	11
5	Alla	35	1.95	16
6	Bungin	237	13.26	8
7	Cendana	91	5.09	7
8	Curio	179	10.02	10
9	Malua	40	2.23	9
10	Baroko	41	2.29	5
11	Buntu Batu	127	9.16	6
12	Masalle	68	3.80	8
JUMLAH		1.786	100.00	127

Sumber: Kabupaten Enrekang dalam angka, 2019

Data dalam tabel 1 diatas dapat memberikan gambaran mengenai luas wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan. Dari data tersebut terlihat kecamatan bahwa dari 12 kecamatan yang berada di wilayah

Kabupaten Enrekang maka yang memiliki luas wilayah paling luas adalah kecamatan Maiwa dengan luas wilayah mencapai 393 km² dengan 22.00 persen dari presentase luas wilayah Kabupaten Enrekang. Sedangkan wilayah yang memiliki luas paling kecil adalah kecamatan Baroko dengan luas wilayah hanya mencapai 41 km² dengan sekitar 5 persen dari luas wilayah Kabupaten. Dari Jumlah Desa/Kelurahan, maka kecamatan yang paling banyak jumlah Desa dan Kelurahan dengan mencapai 15 desa/kelurahan, sedangkan yang memiliki jumlah desa dan kelurahan yang paling sedikit yaitu kecamatan Baroko yaitu dengan hanya memiliki 5 buah desa dan kelurahan.

Kondisi topografi Kabupaten Enrekang adalah bervariasi dari datar hingga curam. Keadaan wilayah berdasarkan keterangan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4.2 Keadaan wilayah Kabupaten Enrekang berdasarkan tingkat kelerengan.

Kelerengan	Kriteria	Luas (Ha)	Presentase
0 – 2	Datar	13.841	7,74%
2 – 15	Landau	12.758	7,14%
15 – 40	Agak Curam	75.175	42,39%
>40	Curam	76.287	42,71%
JUMLAH		178.061	100%

Sumber: Kabupaten Enrekang dalam angka, 2019

Berdasarkan data yang ada diatas dapat diketahui bahwa kondisi topografi Kabupaten Enrekang dilihat dari kelerengan berada pada tingkat kelerengan yang curam yakni mencapai 76.287 Ha. Dari kondisi tersebut hal ini sangat realistis karena daerah ini berada pada wilayah perbukitan, dan ibukota Kabupaten Enrekang sendiri berada pada daerah lembah. Dan sebagaimana terlihat topografi wilayah ini yang berupa dataran memiliki presenrase hanya sekitar 7,74% dan daerah landai sekitar 7,14%.

2. Kecamatan Alla

Kecamatan Alla adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah mencapai 34,66 km² yang terdiri dari 5 desa yaitu Desa Pana, Desa Sumillan, Desa Mata Allo, Desa Bolang dan Desa Taulo dan 3 kelurahan yakni Kelurahan Buntu Sugi, Kelurahan Kambiolangi, dan Kelurahan Kambiolangi. Kecamatan Alla merupakan sentra perekonomian di Kabupaten Enrekang, hal ini terjadi disebabkan karena Kecamatan Alla telah menjadi sentra perekonomian dan menjadi tempat strategis jalur peredaran hasil bumi di Kabupaten Enrekang seperti hasil pertanian, hal ini didukung dengan tersedianya berbagai fasilitas yang menunjang seperti telah dibangunnya Sub Terminal Agro (STA) dan pasar Agro yang berada di desa Sumillan sehingga sebagian besar hasil pertanian di Kabupaten Enrekang yang berasal dari Kecamatan Alla, Baroko, Curio, Masalle, Baraka, Buntu Batu, Malua, Bungin dan Anggeraja akan di kumpulkan di Sub Terminal Agro (STA) untuk di distribusikan keluar Enrekang. Kecamatan Alla merupakan salah satu kecamatan yang telah ditunjuk sebagai pilot projek dalam pusat

dalam perekonomian sehingga hasil produksi pertanian selama ini terfokus pada Kecamatan Alla.

Berikut Visi dan Misi dari Kecamatan Alla yaitu :

1) Pernyataan Visi

Visi pembangunan Kecamatan Alla merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai kedepan yang disusun dengan memperhatikan substansi rencana strategis Kecamatan Alla. RPJPD Kabupaten Enrekang RPJM Nasional dan Propinsi Sulawesi Selatan, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Enrekang.

2) Penjelasan Visi

“Mewujudkan kecamatan Alla Sebagai Kecamatan Yang Profesional Didalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kawasan Agropolitan Yang lebih Maju dan Sejahtera”

3) Pernyataan Misi

Misi sebagai suatu komitmen dalam upaya mewujudkan visi sebagaimana diuraikan diatas, disusun setelah mengkaji makna visi dan keserasiannya dengan lingkungan strategis yang dihadapi serta memperhitungkan kemungkinannya untuk dijabarkan dalam arah kebijakan, program prioritas dan pokok-pokok program serta kegiatan, maka misi yang kami emban diuraikan sebagai berikut:

- a) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- b) Mengembangkan keunggulan komoditas dan produktivitas berdaya saing tinggi berbasis masyarakat, melalui pendekatan pembangunan agropolitan yang berkesinambungan berbasis lingkungan menuju kemandirian daerah.
- c) Mengembangkan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik, serta kelancaran mobilisasi sosial dan ekonomi antar Desa/Wilayah.
- d) Pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk pelayanan public.
- e) Pengembangan Perekonomian berbasis masyarakat secara merata dan berkeadilan.

3. Tugas Dan Struktur Organisasi Kantor Camat Alla

Berikut Tugas dan Struktur Organisasi Kantor Camat Alla.

a. Tugas

1. Camat

Organisasi kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang memiliki tugas pokok untuk menjalankan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 pasal 17 tentang Kecamatan.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris camat merupakan pimpinan secretariat kecamatan yang bertanggungjawab kepada camat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 41 tahun 2007 menyatakan bahwa jabatan sekcam merupakan jabatan struktur eselon III.B. tugas pokok sekcam yaitu melaksanakan urusan umum seperti administrasi, tata

usaha, membuat laporan kepada camat, maupun melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh camat.

3. SUB. Bagian Keuangan dan Perencanaan

Tugas pokok dari Sub. Bagian Keuangan dan perencanaan adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait urusan keuangan dan perencanaan.

4. SUB. Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok bagian Umum dan Kepegawaian adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melakukan koordinasi, serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan administrasi, baik administrasi umum, perlengkapan, maupun kepegawaian.

5. Seksi Pemerintahan

Tugas utama seksi pemerintahan adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasi serta mengawasi jalannya kegiatan pemerintah, serta administrasi kependudukan dan pertahanan di wilayah kecamatan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas utama seksi kesejahteraan sosial adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan serta mengawasi jalannya kegiatan pendataan serta pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas di wilayah kecamatan.

7. Seksi Peraturan dan Tata Tertib

Tugas utama dari seksi peraturan dan tata tertib adalah memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, serta kegiatan pembinaan kesejahteraan, dan ketertiban wilayah serta melakukan koordinasi terkait tugas lapangan polisi pamongpraja di tingkat kecamatan.

8. Seksi Pembangunan

Seksi pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan pertanian, kehutanan dan perkebunan, perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal serta koperasi, pertambangan dan pemberdayaan masyarakat.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi pelayanan umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, dimana tugas-tugas pokok dari seksi ini antara lain adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengatur jalannya kegiatan urusan pelayanan umum yang meliputi yaitu kebersihan, sarana serta prasarana lingkungan kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

3. Kantor Bank Republik Indonesia (BRI) Unit Kalosi

Kantor BRI Unit Kalosi berada di Jl. Poros Enrekang Toraja, kelurahan kambiolangi. Kantor Bank Republik Indonesia (BRI) Unit Kalosi memiliki jarak sekitar 30 km² dari ibukota kabupaten enrekang. Kekuatan Sumber daya manusianya atau jumlah pekerjanya ada 16 orang dengan memiliki 4 karyawan perempuan dan 11 karyawan laki-laki dengan jumlah Account Officier (Mantri) ada 6 orang dengan

formasi mantri 3 Mantri Kupedes, 1 Mantri Briguna, 2 Mantri KUR. BRI Unit kalosi memiliki 1 Teras BRI yang berlokasi di Kelurahan Kalosi.

Berdasarkan pembagian wilayah kerja dengan BRI Unit Pasar Sudu, BRI Unit kalosi memiliki wilayah kerja di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Alla, Baroko dan Masalle. Wilayah kerja di Kecamatan Alla dengan mencakup Kelurahan Kalosi, Kelurahan Buntu Sugi, Desa Pana, Desa Bolang dan Desa Mata Allo sedangkan pada Wilayah Kecamatan Baroko mencakup Desa Benteng Alla, Desa Baroko dan desa Patongloan dan juga mencakup keseluruhan yang berada di Kecamatan Masalle yaitu Desa Buntu Sarong, Desa Mundan, Desa Rampunan, Desa Batu Ke'de, Desa Masalle, Desa Tongkonan Basse.

Berikut Visi, Misi dari Kantor BRI Unit Kalosi

Visi

Menjadikan BRI sebagai Bank Komopersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

Misi

- a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat
- b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen resiko yang efektif serta praktik Good Corporate Gocernance (GCG) yang sangat baik.

- c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

4. Struktur Organisasi dan Tujuan Jabatan BRI Unit Kalosi

- a. Tujuan Jabatan.

1. Kepala BRI Unit Kalosi

Tujuan jabatan dari Kepala BRI Unit Kalosi adalah mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan operasional Jaringan Kerja Bisni Mikro (BRI Unit, Teras BRI dan e-channel yang dikelola) dengan menetapkan strategi pengembangan bisnis, menciptakan dan memanfaatkan peluang bisnis, meningkatkan pertumbuhan bisnis/mencapai target kerja yang telah ditetapkan dan melakukan pengawasan operasional serta memberikan pelayanan prima kepada nasabah sesuai dengan kebijakan/ketentuan yang berlaku serta kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi Pemasaran Bisinis Mikro

- 1) Mantri Kupedes

Tujuan jabatan dari mantra kupedes yaitu melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro (pinjam, simpan, dan jasa bank lainnya) serta melakukan prakarsa dan analisis usulan putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit termasuk melakukan pembinaan terhadap nasabah BRI Unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asset, serta memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

2) Mantri Briguna

Tujuan jabatan dari mantri briguna yaitu melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro (pinjam, simpan, dan jasa bank lainnya) serta melakukan prakarsa dan analisis usulan putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit termasuk melakukan pembinaan terhadap nasabah BRI Unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asset, serta memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

3) Mantri KUR

Tujuan jabatan dari mantri KUR yaitu melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro (pinjam, simpan, dan jasa bank lainnya) serta melakukan prakarsa dan analisis usulan putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit termasuk melakukan pembinaan terhadap nasabah BRI Unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asset, serta memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

4) Mantri Teras

Tujuan jabatan dari mantri teras yaitu melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro (pinjam, simpan, dan jasa bank lainnya) serta melakukan prakarsa dan analisis usulan putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit termasuk melakukan pembinaan terhadap nasabah BRI Unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asset, serta memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

3. Fungsi Operasional BRI Unit

1) Supervisor Unit

Fungsi supervisor unit yaitu menyelenggarakan pelaksanaan operasional Jaringan Kerja Bisnis Mikro (BRI Unit, Teras BRI dan e-channel yang dikelola) termasuk pengelolaan kas, administrasi pembukuan, logistic telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

2) Customer Service

Melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankan mikro serta melaksanakan fungsi administrasi pinjaman berdasarkan standar layanan dengan prosedur yang jelas, bersifat rutin dengan administrasi relatif kompleks dan membutuhkan supervise yang ketat untuk memastikan tugas/kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan

ketentuan/kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

3) Teller

Fungsi teller yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah atau calon nasabah berupa transaksi pembukuan untuk kepentingan bisnis BRI dengan kegiatan sesuai tingkat kewenangan, kegiatan pengisian kas ATM dan administrasi berdasarkan prosedur yang jelas bersifat rutin dan membutuhkan supervisi yang ketat berdasarkan ketentuan/kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

4) Pelaksana Administrasi KUR

Fungsi jabatan pelaksana administrasi Administrasi KUR adalah melaksanakan kegiatan administrasi dan operasional bidang administrasi KUR Mikro dalam melayani kebutuhan dan pengelolaan data KUR Mikro yang bersifat rutin dengan berdasarkan prosedur yang jelas, dengan administrasi sederhana dan membutuhkan supervisi yang ketat untuk memastikan tugas/kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan/kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

4. Teras BRI Kantor (Permanent Office)

1) Customare Service

Melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankan mikro serta melaksanakan fungsi administrasi pinjaman berdasarkan standar layanan dengan prosedur yang jelas, bersifat rutin dengan administrasi relatif kompleks dan membutuhkan supervise yang ketat untuk memastikan tugas/kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan/kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

2) Teller

Fungsi teller yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah atau calon nasabah berupa transaksi pembukuan untuk kepentingan bisnis BRI dengan giat sesuai tingkat kewenangan, kegiatan pengisian kas ATM dan administrasi berdasarkan prosedur yang jelas bersifat rutin dan membutuhkan supervisi yang ketat berdasarkan ketentuan/kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

B. Hasil Penelitian Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Pembahasan pada penyajian data merupakan hasil analisis serta fakta yang peneliti sempat temukan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan.

Bank BRI Unit Kalosi telah menerapkan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 dimana didalam kebijakan tersebut terdapat penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9% menjadi 7% dan kelompok usaha yang menjadi calon penerima KUR. Disini terdapat peningkatan debitur KUR dari tahun 2016-2018, hal ini disebabkan karena adanya antusias dari beberapa masyarakat akan adanya dana KUR dan didukung pula dengan alasan sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Alla adalah petani dan pedagang yang tentunya membutuhkan modal yang besar dalam meningkatkan usahanya.

Pada kesempatan ini peneliti menggunakan teori dari Winarno mengenai kebijakan dalam menghasilkan informan terhadap kriteria Implementasi program ktedit usaha rakyat. Pengantar analisis kebijakan publik dimana kebijakan publik merupakan sebagai suatu proses yang menggambarkan berdasarkan kriteria-kriteria kebijakan public yang efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, serta ketepatan. Adapun yang menjadi pembahasan dari hasil penelitian di lapangan maka dari itu peneliti dapat memaparkan sebagai berikut.

1. Efektifitas

Dimensi efektifitas adalah suatu yang berkaitan langsung dengan target dari pencapaian suatu tujuan dari sebuah usaha yang sempat dilakukan.

Apakan hasil yang diinginkan telah tercapai dalam hal ini adalah penerima KUR. Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, maka semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin

efektif organisasi, program atau kegiatan. Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangatlah bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Efektifitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Efektifitas suatu alternative mencapai hasil yang diharapkan dari kebijakan yang dengan tercapainya tujuan yang sudah direncanakan oleh pihak dari pegawai, ketetapan waktu dengan mencapainya suatu kebijakan harus memperhatikan ketetapan waktu yang sudah ditargetkan sebelumnya.

Hal yang pertama, pencapaian target jumlah peserta program KUR dengan menjadi tolak ukur efektifitas dari program KUR di Kecamatan Alla terhadap hasil (akibat) yang diharapkan dari BRI Unit Kalosi, sudah sejauh mana BRI Unit Kalosi sebagai pelaksana program KUR untuk meningkatkan jumlah peserta KUR di Kecamatan Alla.

Berikut adalah tabel jumlah penerima KUR dari tahun 2016 sampai 2019.

Tabel 4.3 Jumlah Penerima KUR di Kecamatan Alla

No	Usaha	Jenis Usaha	Jumlah Penerima KUR		
			2016	2017	2018
1	Pertanian	Holtikultura	35 orang	39 orang	46 orang
2	Perdagangan	Sepatu/sandal	17 orang	21 orang	22 orang
		Jam	11 orang	14 orang	14 orang
		Barang Campuran	18 orang	23 orang	27 orang
3	Industri	Pembuatan Tahu	5 orang	5 orang	5 orang
4	Peternakan	Ternak Kambing	5 orang	6 orang	4 orang
		Ternak Sapi	6 orang	5 orang	4 orang
Jumlah			97	111	122

Sumber: BRI Unit Kalosi Dalam Angka 2019

Pada tabel diatas terdapat kenaikan jumlah penerima KUR dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2016, 2017 dsn 2018, dari berbagai usaha di kecamatan Alla yakni dari usaha Pertanian, Perdagangan, Industri, dan Peternakan terdapat kenakian pengguna KUR, namun apabila dilihat dari jenis usaha yang mengalami kenaikan pengguna KUR paling banyak terdapat pada jenis usaha pertanian dan perdagangan. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Kecamatan Alla memiliki profesi atau mata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Kemudian usaha yang memiliki paling sedikit pengguna KUR yaitu dari jenis usaha industri, hal ini disebabkan

karena usaha industri yang ada dikecamatan Alla hanya pembuatan tempe/tahu. Dan itupun hanya sedikit bahkan bisa dihitung jari orang yang bergelut di usaha ini.

Kemudian adapun dana KUR yang cair dalam tiga tahun terakhir, terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Nominal Dana KUR Yang Cair 3 tahun Terakhir

No	Tahun	Tipe Usaha			
		Pertanian	Perdagangan	Industri	Peternakan
1	2016	685.000.000	365.000.000	80.000.000	60.000.000
2	2017	815.000.000	425.000.000	85.000.000	60.000.000
3	2018	910.000.000	510.000.000	110.000.000	80.000.000
Jumlah		2,410.000.000	1,300.000.000	275.000.000	200.000.000

Sumber : BRI Unit Kalosi Dalam Angka 2019

Berdasarkan data diatas menunjukkan jumlah dana KUR yang di salurkan ke masyarakat kecamatan Alla tiga tahun terakhir. Dari data tersebut jumlah dana KUR yang dikeluarkan kepada masyarkat terbesar terdapat pada jenis usaha pertanian yaitu mencapai 1,710.000.000, hal ini disebabkan karena minat masyarakat terhadap KUR untuk membiayai usaha pertanian mereka cukup besar. Kemudian jumlah dana KUR terkecil yang tersalurkan ke masyarakat yaitu berasal dari jenis usaha peternakan. Hal ini disebabkan karena hanya segelintir masyarakat di kecamatan Alla yang memiliki profesi sebagai peternak.

Sesuai dengan temuan yang ditemukan di lapangan implementasi Program KUR, berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BRI Unit Kalosi hal yang dapat tercermin dari pernyataan informan mengatakan:

“dalam pencapaian hasil dari pelaksanaan KUR sudah mengalami kenaikan jumlah penerima KUR dari tiap tahunnya” (wawancara dengan informan SY, 03 Mei 2019)”

Berdasarkan wawancara dengan mantri KUR , informan menyatakan sebagai berikut:

“selama ini dari berbagai jenis usaha yang telah kami layani dalam pengambilan KUR tentunya jenis Usaha dalam bidang perdagangan yang memiliki banyak peminat tentang KUR” . (wawancara dengan informan FA, 09 Mei 2019.)”

Selanjutnya mengukur implementasi program KUR di kecamatan Alla, berikut wawancara dari mantri KUR dalam capaiannya menjalankan program KUR sebagai berikut:

“pencapaian program KUR di kantor BRI unit Kalosi mengalami peningkatan namun belum terlalu signifikan, hal ini kami jadikan tolak ukur untuk lebih meningkatkan kinerja agar mencapai target yang ditentukan ”. (wawancara dengan informan FL, 03 Mei 2019)”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bank BRI Unit Kalosi selaku pelaksana kegiatan sudah hampir mencapai hasil yang diinginkan terbukti dengan adanya peningkatan jumlah penerima KUR dari 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai 2018.

Selain itu hampir semua jenis usaha yang ada di Kecamatan Alla dapat mengambil KUR, namun yang memiliki minat paling banyak tentang penggunaan

KUR yaitu dari jenis usaha perdagangan dan pertanian, hal ini disebabkan mayoritas masyarakat Kecamatan Alla memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pedagang.

Dari beberapa pernyataan diatas menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan program KUR yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Kalosi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu pula didukung dengan pernyataan dari KA Bri Unit Kalosi mengemukakan bahwa:

“hampir semua jenis usaha di Kecamatan Alla dapat mengambil KUR kecuali dari Koperasi dan beberapa jenis usaha yang dilarang oleh pemerintah seperti penjualan cakar, penjualan minuman keras dan prostitusi”. (Wawancara dengan Informan SY, 03 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa efektifitas pelaksanaan program KUR oleh Bank Unit Kalosi sudah dilakukan secara optimal apalagi dengan telah kenaikan jumlah penerima KUR dan hampir semua jenis usaha mikro/kecil bisa mengambil KUR..

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha dan seberapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai target pengguna KUR , semakin singkat atau sedikit waktu yang ditempuh dan hasil yang diinginkan tercapai maka semakin baik waktu yang diperlukan dalam menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha atau hasil, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Usaha yang dilakukan untuk menghasilkan target dalam pencapaian tujuan yang tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan sehingga suatu

kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, berkaitan dengan usaha yang dilakukan Bank BRI Unit Kalosi dan sistem serta prosedur dalam pelayanan KUR.

Tabel 4.5 Kolektibilitas Pinjaman Dana kredit Usaha Rakyat

No	Tahun	Kolektibilitas		
		Lancar	Kurang Lancar	Macet
1	2016	94 orang	3 orang	0 orang
2	2017	108 orang	1 orang	2 orang
3	2018	119 orang	2 orang	1 orang

Sumber : BRI Unit Kalosi Dalam Angka 2019

Tabel diatas tersebut menunjukkan keadaan pinjaman dana KUR tiga tahun terakhir, dari data diatas jumlah debitur KUR yang mengalami kredit lancar terbanyak terletak pada tahun 2018 yaitu 118 orang, kemudian jumlah kredit kurang lancar terbanyak terdapat pada tahun 2016 yaitu mencapai 3 orang, sedangkan kredit macet terbanuak terdapat pada tahun 2017 dengan debitur sebanyak 2 orang.

Keterangan:

a. Lancar

Apabila debitur melakukan kewajiban untuk membayar angsuran KUR tepat waktu.

b. Kurang Lancar

Apabila debitur tidak melakukan kewajiban untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan perjanjian dengan pihak Bank.

c. Macet

Apabila debitur tidak melakukan kewajiban membayar angsuran KUR selama berkali-kali.

Namun dari data tersebut diatas masih bisa diimbangi dengan pencapaian target penyaluran dana KUR kepada masyarakat di Kecamatan Alla. Berikut adalah daftar jumlah dana penyaluran KUR dari tiga tahun terakhir

Tabel 4.6 Jumlah Pencapaian Target Dana Penyaluran KUR

No	Tipe Usaha	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pertanian	685.000.000	815.000.000	910.000.000
2	Perdagangan	365.000.000	425.000.000	510.000.000
3	Industri	80.000.000	85.000.000	110.000.000
4	peternakan	60.000.000	60.000.000	80.000.000
Jumlah		1.190.000.000	1.385.000.000	1.610.000.000

Sumber : BRI Unit Kalosi dalam Angka 2019

Target penyaluran dana KUR dari pemerintah kepada BRI Unit mencapai angka 1 miliar. Dari data diatas menunjukkan bahwa terdapat pencapaian target penerima KUR di Kecamatan Alla dari tiga tahun terakhir, terdapat pencapaian target penerima KUR sudah melampaui batas target yang diberikan oleh pemerintah.

Namun terlepas dari itu semua terdapat beberapa bukti wawancara yang dilakukan dengan pada Bank BRI Unit Kalosi dalam menjalankan program KUR

untuk menghasilkan target adalah berdasarkan dari pemaparan Ketua BRI Unit Kalosi berkaitan dengan usaha atau apa yang dilakukan di lapangan, hal yang dapat tertuang dari persyataan sebagai berikut:

“khusus dari BRI Unit kalosi penyaluran dana KUR dari pemerintah selalu terlampaui sehingga kadang-kadang bulan oktober atau November penyaluran KUR mikro dari BRI sudah dihentikan karena telah melampaui target yang diberikan yaitu pencairan dana mencapai 1 M, dan akan kembali menyalurkan KUR setelah pemerintah membagikan kuota target biasanya pertengahan januari KUR dapat disalurkan lagi ”. (wawancara dengan informan SY, 10 Mei 2019)”

Wawancara juga dilakukan dengan mantra KUR mengatakan bahwa:

“selama ini kami sudah bekerja keras demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan KUR, usaha tersebut tidak sia-sia terbukti dengan terpenuhinya target dana penyaluran KUR di tiap tahunnya” (wawancara dengan FA, 29 Mei 2019)”

Dari beberapa hasil wawancara diatas bahwa terdapat pencapaian target dana penyaluran KUR oleh Bank BRI Unit Kalosi di tiap tahunnya, tentunya hal tersebut dapat terjadi karena kerja keras para pegawai dalam memberikan pemahaman KUR kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan mantri KUR menyatakan sebagai berikut:

“tentunya dari segi efisiensi standar proses penyaluran KUR maksimal 2 hari kredit sudah bisa cair tergantung dari kesiapan berkas masyarakat calon debitur, namun bisa juga hanya dalam waktu 10 menit uang sudah bisa cair ke debitur, itu terjadi apabila semua persyaratan pengambilan KUR sudah di lengkapi”. (Wawancara dengan informan FL, 03 Mei 2019)”

Selanjutnya wawancara dengan mantri KUR menyatakan sebagai berikut:

“dalam implementasi KUR sudah sangat efisien dilakukan terbukti dari tidak adanya agungan dalam pengambilan kreditnya serta persyaratannya yang

hanya menggunakan KTP, kartu keluarga dan surat izin usaha”. (Wawancara dengan informan FA, 09 Mei 2019).

Dari hasil wawancara informan diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi yang telah ada sudah berjalan dengan baik terlihat dari tercapainya target dana penyaluran KUR serta adanya kesesuaian antara jumlah uang yang diajukan sesuai dengan yang dicairkan oleh pihak Bank, serta diukur dari efisiensi biaya dan waktu serta kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menggunakan KUR sudah ada peningkatan.

3. Kecukupan

Kecukupan berarti biaya tetap dan efektivitas tetap atau dengan kata lain kecukupan dapat terpenuhi dengan adanya rasa kepuasan dari masyarakat yang menggunakan program KUR dengan seluruh proses pelayanan efek yang dirasakan oleh masyarakat serta masyarakat juga merasa puas ketika ada keluhan yang dirasakan atau kurangnya tanggapan yang baik pada debitur KUR atau pelaksana yang bertanggung jawab dapat menyelesaikan permasalahan dari masyarakat tersebut sebagai bentuk dan respon cepat untuk menyelesaikan program KUR.

Untuk mengukur kriteria kecukupan ini sebagai peneliti lebih melakukan pendalaman kepada masyarakat sebagai pengguna KUR dari hasil pengakuan informan dapat disimak sebagai berikut:

Wawancara dengan informan menyatakan bahwa:

”kalau di BRI Unit kalosi hanya melayani untuk KUR mikro saja yaitu maksimal pengambilan uang mencapai 25 juta itu juga ditujukan untuk usaha

sektor kecil saja namun untuk KUR diatas 25 juta hanya dilayani di kantor cabang saja.” (wawancara dengan informan N, 27 Mei 2019)”.

Informan selanjutnya dari bapak yang menggunakan KUR beliau menyatakan sebagai berikut:hampur sama dengan yang diutarakan oleh informan diatas, wawancara selanjutnya oleh informan, menyatakan:

“saya merasa puas dengan adanya KUR sebab dengan pengambilan KUR yang bisa mencapai 25 juta tentunya sudah sangat cukup bahkan lebih dalam mempertahankan kelangsungan usaha saya. (wawancara dengan Informan W, 27 Mei 2019)”

Dari beberapa wawancara diatas dapat diketahui bahwa jenis usaha yang bisa dibiayai oleh KUR adalah jenis KUR mikro dan kecil saja hal ini karena jumlah maksimal dana yang dapat dicairkan Bank maksimal 25 juta. Informan selanjutnya dari bapak yang menggunakan KUR, menyatakan bahwa:

“masalah cukup atau tidak cukup kalau masalah uang tentunya tidak ada yang merasa cukup tetapi menurut saya ini sudah sangat membantu dalam hal kelangsungan usaha yang selama ini saya kerjakan apalagi dari KUR inilah saya bisa melanjutkan usaha sampai sekarang sejak 5 tahun terakhir saya menjadi debitur KUR” (wawancara dengan Informan A, 16 Mei 2019)”.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan diatas dapat dikatakan bahwa seberapa jauh usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam program KUR yaitu dengan melayani jenis KUR mikro saaja dengan maksimal pengambilan uang sapai 25 juta ini sudah berjalan dengan baik berdasarkan dari kesimpulan informan yang merasa sudah mendapatkan kepuasan dengan adanya program KUR tersebut.

4. Pemerataan

Pemerataan sangat erat hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber

daya dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan merupakan kebijakan yang hasil usahanya secara adil didistribusikan. Suatu kebijakan mungkin dapat efektif, efisien dan merata inti atau kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran, tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi para UMKM atas dasar kesamaan dan pemerataan.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan mantri KUR BRI unit Kalosi sebagai berikut:

“Dalam pelayanan KUR di kantor kami kepada masyarakat siapa pun yang ingin mengambil kredit KUR sama sekali tidak dibedakan satu sama lain dalam hal pelayanan asalkan memenuhi prosedur atau ketentuan yang berlaku seperti halnya persyaratan-persyaratan yang memang menjadi ketentuan seperti hanya menggunakan surat izin usaha, KK, dan KTP maka akan dilayani dengan sepenuh hati apalagi program ini adalah program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat agar tercapai kesejahteraan” (wawancara dengan informan FL, 09 Mei 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan KA BRI Unit Kalosi menyatakan :

“program KUR ini sudah merata diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Alla dalam artian bahwa mereka yang menjadi sasaran program adalah orang-orang yang memiliki usaha asalkan usahanya tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah” (wawancara dengan informan SY, 10 Mei 2019)”

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dikatakan bahwa pemerataan program serta pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan masyarakat peserta KUR, menyatakan:

“Dalam memberikan pelayanan mereka cenderung cepat, tidak ada pembedaan antara debitur yang lain apalagi saya sudah lama menjadi debitur

KUR sehingga saya sudah dikenali oleh pegawai bank, mereka cenderung ramah”(Wawancara dengan informan W, 29 Mai 2019)”

Sama halnya dengan yang diutarakan oleh bapak yang menjadi informan saya beliau menyatakan:

“selama ini saya tidak memiliki kendala tentang pelayanan KUR oleh pihak bank justru mereka sering menawarkan lagi untuk melanjutkan kredit sementara kredit kita yang sebelumnya belum lunas sepenuhnya, tidak ada juga yang namanya diskriminasi karena sama-sama dilayani sesuai dengan nomor antrian Bank jadi tidak ada yang merasa dibedakan”.(wawancara dengan informan Y, 16 Mei 2019)”

Berdasarkan dari hasil penelitian sebagai penulis saya dapat bahwa program kredit usaha rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang mengenai pemerataan pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam pencapaian kesejahteraan umum program ini sudah berhasil dalam pemerataan pelayanan yang baik.

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran target kebijakan apakah mendapatkan pelayanan yang baik atau tidak, preferensi atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas berbicara tentang apakah kriteria, efektifitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan secara nyata mencerminkan kebutuhan, preferensi dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu. Responsivitas pada program KUR ini relative baik

Tujuan pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan warga pengguna agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memuaskan, oleh karenanya seorang penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan warga pengguna, kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang diinginkan warga pengguna tersebut.

Dalam instransi pemerintah yang menjadi pelayan public pengukuran kinerjanya menjadi sangat penting dalam hal menilai seberapa jauh kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi harapan masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan dalam hal pemberian pelayanan, selain itu pengukuran kerja juga dapat dijadikan tolak ukur apakah masyarakat sudah puas dengan kinerja pelayanan yang ada. Itu sebabnya dengan adanya informasi tentang penilaian kerja tersebut dapat dijadikan rujukan dalam membenahi kinerja agar lebih sistematis dan tepat arah sehingga tujuan ataupun misi organisasi bisa tercapai dengan baik dan pelayanan public yang diberikan bisa lebih optimal. Dengan adanya kinerja birokrasi yang tinggi maka organisasi tersebut akan berjalan secara efektif, efisien dan responsif dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat pengguna KUR, menyatakan:

”Program kredit usaha rakyat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sangat kami sambut dengan baik apalagi dengan adanya program KUR oleh pemerintah sebagai salah satu dalam kebijakan kepada masyarakat yang menjadikan kami para pengguna program KUR merasa diperhatikan dalam

hal kesejahteraan perekonomian kami, walaupun awalnya kami sedikit ragu dan takut kalau nantinya tidak sanggup membayar tetapi ternyata sangat bayak kemudahan-kemudahan yang diberikan sehingga kami merasa tidak terlalu terbebani dengan bunga yang diberikan”(wawancara dengan informan A, 03 Mei 2019)”

Selanjutnya berdasarkan dari wawancara dengan Ketua BRI Unit Kalosi, menyatakan:

“selama ini saya tidak pernah mendengar keluhan dari masyarakat mengenai masalah penyaluran KUR, tetapi kalau masukan- masukan seperti masyarakat ingin bunga KUR diturunkan lagi biasa saya dengar dari masyarakat namun tentunya keinginan seperti itu sangat sulit untuk ditepati karena kami selaku pihak bank hanya sebagai penyalur ”. (wawancara dengan Informan SY, 10 Mei 2019)”

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat informan, menyatakan:

“saya puas dengan pelayanan yang diberikan apalagi sewaktu saya baru pertama kali menggunakan KUR banyak hal yang tidak saya ketahui tetapi pegawai yang bersangkutan dengan senang hati memberikan penjelasan kepada saya serta pelayanan yang diberikan sangat cepat dan tepat tanpa harus merasa dibedakan dengan debitur lain.”(wawancara dengan Informan M, 27 Mei 2019)”

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara yang saya lakukan kepada informan terkait bahwasannya dapat dikattakan bahwa program kredit usaha rakyat berjalan dengan baik di wilayah Kecamatan Alla.

6. Ketepatan

Ketepatan secara dekat adalah berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pernyataan mengenai masalah ketepatan kebijakan tidaklah berkenaan dengan satu kriteria individu namun dua atau lebih kriteria secara bersama-sama ketepatan merujuk pada nilai atau tujuan-tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi suatu tujuan dalam sebuah kebijakan public melihat dari segi sasaran apakah sudah tepat sasaran dan ketepatan .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BRI Unit Kalosi, menyatakan:

“kalau berbicara sudah tepat sasaran program KUR ini diberikan kepada masyarakat tentunya menurut saya sudah sangat tepat sasaran sebab dengan adanya program KUR ini sangat membantu khususnya masyarakat yang mau melancarkan usahanya namun terkendala dengan biaya maka dari itu program ini hadir untuk sebagai jembatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat”. (wawancara dengan Informan SY, 03 Mei 2019)”

Sehubungan dengan itu pernyataan yang hampir serupa juga diutarakan oleh mantri KUR, menyatakan:

“kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah untuk rakyat, tentunya melalui perumusan yang panjang untuk bagaimana bisa program ini nantinya memiliki dampak yang baik bagi masyarakat dan ini menjadi tanggung jawab kami sebagai penyalur untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.”(wawancara dengan informan FA, 09 Mei 2019)”

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan masyarakat pengguna KUR, menyatakan :

“selama saya menjadi debitur KUR mengenai ketepatan waktu dalam melayani menurut saya sudah sangat maksimal karena tidak memakan waktu yang panjang, terlebih lagi dengan ketepatan jumlah uang yang diterima selalu

sesuai dengan yang menjadi permohonan saya”.(wawancara dengan informan N, 10 Mei 2019)”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan keseriusan dari pihak penyalur dalam hal ini Bank BRI Unit Kalosi dalam memberikan pelayanan bagi program KUR ini kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Alla. Program KUR ini juga memberikan kemudahan terhadap masyarakat di Kecamatan Alla, dengan adanya pelayanan yang cepat, mudah dan tidak berbelit-belit sehingga itu menjadi salah satu yang sangat membantu masyarakat pengguna kur.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BRI unit Kalosi, menyatakan ;

“dari ketepatan waktu masyarakat dalam melakukan penyetoran sudah sangat baik, namun ada saya pihak yang biasa menunggak disebabkan karena mereka kembali ke tempat asal dan yang biasa seperti ini adalah yang berasal dari Jawa yang tidak melunasi pembayaran lalu menghilang”(wawancara dengan Informan SY,09 Mei 2019)”

Berdasarkan hasil penelitian dan keterangan yang diberikan oleh informan dapat ditarik kesimpulan bahwa semua aspek ketepatan sasaran dari program kredit usaha rakyat sudah berjalan dengan baik dengan kesimpulan dari para informan yang menyatakan kepuasannya terhadap program kredit usaha rakyat dan proses respon pelayanan yang diberikan oleh pihak penyalur terkait seluruh unsur yang berpengaruh dalam program kredit usaha rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan yang perlu

dipahami dalam suatu program kebijakan pemerintah adalah penguasaan terhadap tiga jenis kemampuan yaitu pengetahuan, keterampilan teknis dan sikap perilaku. Dalam menjalankan suatu kebijakan hal yang paling mendasar adalah ketepatan atau sasaran untuk program tersebut.

Dari hasil penelitian dari seluruh yang mengkaji kriteria indikator keberhasilan program pelaksanaan menurut Winarno yang memperhatikan enam aspek yaitu, efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan dengan memadukan antara keterampilan teknis sikap dan perilaku organisasi penulis menyimpulkan bahwa masyarakat mendapatkan kepuasan dalam program kredit usaha rakyat dan menandakan keberhasilan program KUR.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program kredit Usaha Rakyat

Faktor penghambat dalam suatu proses implementasi kebijakan merupakan suatu yang lazim terjadi dimana-mana, dan setiap program mempunyai masalah tersendiri, sehingga penanganannya pun biasanya dikembalikan kepada masing-masing aktor yang membuat atau melaksanakan suatu program dalam merespon masalah-masalah yang muncul dalam implementasi program. Sedangkan faktor pendukung adalah hal-hal yang menjadi pendukung terlaksananya suatu program. Program KUR merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan usaha yang dimiliki, tentunya program tersebut dalam pelaksanaannya memiliki kendala maupun faktor pendukung. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung Implementasi program kredit Usaha Rakyat

a. Suku Bunga Rendah

Suku bunga adalah nilai, tingkat, harga atau ketentuan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode tertentu. Tingkat suku bunga bank digunakan untuk mengontrol perekonomian suatu Negara. Tingkat suku bunga diatur dan ditetapkan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian suatu Negara.

Suku bunga merupakan hal wajib dan pasti ada pada saat pengambilan kredit di Bank. Penetapan tingkat suku Bunga dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Suku bunga dengan tenor 1 bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal atau stance kebijakan moneter.

Dari KUR sendiri memiliki suku Bunga yang terbilang cukup rendah yaitu hanya mencapai 7% pertahunnya dihitung dari seberapa besar kredit yang diambil. Berdasarkan wawancara dengan pengguna KUR, Informan menyatakan :

“awalnya saya sedikit ragu dengan kredit KUR karena takutnya saya tidak bisa membayar cicilan dikarenakan bunga, namun setelah saya mendapatkan penjelasan dari pegawai Bank tentang suku bunga KUR yang hanya 7% pertahun saya langsung memiliki minat untuk menggunakan KUR”. (wawancara dengan Informan N 10 Mei 2019).

Tidak berbeda jauh dengan pernyataan dari bapak pengguna KUR, informan menyatakan :

“saya sangat bersyukur dengan adanya KUR yang disalurkan oleh Bank hal ini menjawab kekhawatiran saya akan besarnya bunga yang dikeluarkan pihak bank dan ternyata dari KUR ini hanya memiliki bunga 7% pertahunnya”. (wawancara dengan Informan Y, 16 mei 2019).

Dari beberapa pernyataan diatas penulis dapat mengatakan bahwa salah satu faktor pendukung dalam implementasi program KUR adalah tingkat suku bunga KUR yang relative rendah yaitu hanya mencapai 7% pertahun.

b. Persyaratan yang sederhana dan tanpa jaminan

dalam pengajuan kredit di bank tentunya memiliki berbagai persyaratan atau jaminan sebagai bukti pengambilan kredit di bank. Namun dengan adanya KUR memberikan kemudahan terhadap masalah-masalah yang biasa menjadi beban bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya masyarakat yang memiliki usaha. Berikut wawancara dengan Informan Kepala BRI Unit Kalosi menyatakan :

“dengan adanya KUR masyarakat utamanya yang memiliki usaha mikro seperti petani dan pedagang sangat terbantu dengan adanya program KUR ini, ketika masyarakat inginkan kami akan berikan, karna KUR mempunyai persyaratan yang hanya menggunakan KTP, KK, dan surat izin usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan serta tidak adanya jaminan dalam pengambilan KUR.”.(wawancara dengan Informan, FL, 09 mei 2019).

Sehungan dengan itu wawancara juga dilakukan dengan masyarakat pengguna KUR, menyatakan sebagai berikut:

“alasan saya memilih KUR sebagai kredit untuk kelangsungan usaha pertanian saya dikarenakan dalam pengambilan KUR persyaratan yang dikeluarkan pihak bank tidaklah rumit sebab hanya menggunakan surat izin usaha, KTP dan KK, serta tanpa jaminan apapun”.(wawancara dengan Informan M, 16 mei 2019).

Berdasarkan dari pernyataan diatas peneliti mengenai faktor pendukung implementasi program dalam hal pengajuan persyaratan yang sederhana dan tidak adanya jaminan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan faktor pendukung diatas dirasakan sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya terbukti dengan kepuasan masyarakat mengenai suku bunga yang rendah serta persyaratan pengambilan KUR yang hanya menggunakan surat izin usaha, KTP dan KK serta tidak dibebankan dengan adanya jaminan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat

a. Gagal Usaha

Dalam berbagai proses pengambilan kredit di dalam bank ada saja kesalahan-kesalahan yang timbul ketika proses berjalan, begitu pula dengan KUR yang tidak luput dengan kesalahan-kesalahan yang timbul tanpa di sengaja seperti halnya kegagalan usaha yang dibiayai KUR. Kredit macet terjadi di karenakan berbagai penyebab salah satunya adalah yaitu usaha yang dimodali KUR gagal sehingga tidak sanggup untuk membayar kredit tepat waktu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan KA BRI Unit Kalosi menyatakan:

“selama ini faktor penghambat yang paling sering terjadi pada program Kredit Usaha Rakyat yaitu sering terjadinya kredit macet yang dalam usahanya mengalami hambatan”(wawancara dengan KA BRI Unit Kalosi, SY, 09 mei 2019).

Wawancara juga dilakukan dengan mantri KUR, menyatakan sebagai berikut:

“yang menjadi penghambat kami dalam pelaksanaan KUR hanya pada ada segelintir orang yang mengambil KUR namun tidak membayar lunas cicilannya hal itu disebabkan karena adanya kegagalan usaha yang dimiliki kemudian tanpa sepengetahuan kami orang tersebut kembali ke kampung halamannya tanpa memberikan informasi apapun”.(wawancara dengan Informan FA, 13 Mei 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan beberapa informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa program KUR di Kantor BRI Unit Kalosi mempunyai hambatan-hambatan yang sering terjadi seperti kredit macet dengan berbagai alasan penyebabnya.

D. Pembahasan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat.

a. efektifitas

Membahas masalah ukuran efektifitas memang sangatlah bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Efektifitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauhmana BRI Unit Kalosi dalam melaksanakan program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Hal yang pertama, pencapaian target jumlah peserta program KUR dengan menjadi tolak ukur efektifitas dari program KUR di Kecamatan Alla terhadap hasil (akibat) yang diharapkan dari BRI Unit Kalosi, sudah sejauh mana BRI Unit Kalosi sebagai pelaksana program KUR untuk meningkatkan jumlah peserta KUR di Kecamatan Alla.

Dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan pengguna KUR, hampir semua jenis usaha di Kecamatan Alla dapat mengambil KUR dengan jumlah pengguna yang

lebih banyak dari industri perdagangan, hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Alla memiliki mata pencaharian sebagai pedagang.

b. Efisiensi

Usaha yang dilakukan untuk menghasilkan target dalam pencapaian tujuan yang tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan sehingga suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, berkaitan dengan usaha yang dilakukan Bank BRI Unit Kalosi dan sistem serta prosedur dalam pelayanan KUR. Yang pertama, kiat atau usaha yang dilakukan Bank BRI Unit Kalosi dalam menjalankan program KUR untuk menghasilkan target adalah berdasarkan dari pemaparan Ketua BRI Unit Kalosi berkaitan dengan usaha atau apa yang dilakukan di lapangan yaitu dalam pelaksanaannya jumlah uang yang diajukan dari para calon debitur akan dicairkan sesuai dengan yang menjadi permohonan debitur.

Disamping itu dengan tidak adanya agungan atau jaminan sangat memberikan kemudahan kepada calon debitur ditambah lagi dengan persyaratan yang tidak memberatkan calon debitur.

c. Kecukupan

Kecukupan berarti biaya tetap dan efektivitas tetap atau dengan kata lain kecukupan dapat terpenuhi dengan adanya rasa kepuasan dari masyarakat yang menggunakan program KUR dengan seluruh proses pelayanan efek yang dirasakan oleh masyarakat serta masyarakat juga merasa puas ketika ada keluhan yang dirasakan atau kurangnya tanggapan yang baik pada debitur KUR atau pelaksana

yang bertanggung jawab dapat menyelesaikan permasalahan dari masyarakat tersebut sebagai bentuk dan respon cepat untuk menyukseskan program KUR.

Dalam pelaksanaan program KUR yang ada di BRI Unit Kalosi hanya melayani jenis usaha perorangan atau KUR mikso saja, dengan jumlah maksimal pengambilan KUR mencapai 25 juta. Apabilan KUR diatas 25 juta hanya dilakukan di BRI Cabang. Namun terlepas dari itu masyarakat sudah merasa puas dengan jumlah uang yang dikeluarkan dari program KUR.

d. Pemerataan

Perataan sangat erat hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dalam pelaksanaan KUR di Kecamatan Alla. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan merupakan kebijakan yang hasil usahanya secara adil didistribusikan. Suatu kebijakan mungkin dapat efektif, efisien dan merata inti atau kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran, tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi para UMKM atas dasar kesamaan dan pemerataan.

Dalam pelaksanaan program KUR kepada masyarakat sudah dilakukan dengan memberikan KUR pada hampir semua jenis usaha yang ada di kecamatan Alla, kemudian terkecuali dari jenis usaha yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah seperti halnya prostitusi, perdagangan pakaian bekas, dan penjualan minuman keras.

Dalam pemberan pelayanan mereka juga cenderung cepat dan sigap dalam melayani masyarakat serta tidak adanya perbedaan pelayanan yang diberikan antara

debitur KUR dengan debitur lain, justru dalam pemberian pelayanannya KUR cenderung lebih cepat bisa hanya memakan waktu 10 menit dan paling lambat 2 hari tergantung dari kelengkapan berkas persyaratan.

e. Responsifitas

Responsifitas dapat diartikan sebagai Responsivitas atau daya tanggap terhadap respon, keluhan atau bahkan kemauan masyarakat pengguna KUR, penyusunan prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas maksudnya mengukur daya tanggap suatu organisasi terhadap harapan, keinginan dan bahkan dari aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan (Agus Dwiyanto :2006).

Dalam pelaksanaan program KUR masyarakat sudah mendapatkan kepuasan tersendiri mengenai pelayanan yang diberikan apalagi dengan pengakuan masyarakat yang menyatakan bahwa dengan adanya program KUR mereka merasa diperhatikan dalam hal kelangsungan usaha yang dimiliki. Kemudian terdapat pula pengakuan dari kepala BRI Unit Kalosi yaitu mengatakan bahwa selama ini belum ada keluhan yang diterima mengenai pelaksanaan KUR atau bahkan pada pelayanan yang diberikan.

a. Ketepatan

Ketepatan tepatnya merujuk pada nilai dari tujuan program serta pada kuatnya pendapat yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah suatu hasil dari semua alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan dari tujuan yang layak.

Dalam kriteria ketepatan sasaran program KUR sudah dirasakan tepat sasaran yaitu merujuk pada masyarakat yang memiliki usaha namun sangat sulit dalam mengembangkan usahanya dikarenakan terkendala pada biaya, disini KUR hadir sebagai jawaban atas kekhawatiran masyarakat akan kelangsungan usaha yang dimiliki.

Kemudian dilihat dari ketepatan jumlah uang yang diterima atau yang dicairkan dirasakan sudah sesuai dengan yang menjadi pengajuan dari masyarakat. Asalkan tidak melebihi dari 25 juta.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, maka berdasarkan dari kebijakan dapat ditarik kesimpulan 6 (kriteria) dalam pelaksanaan kebijakan sudah berhasil atau tidak. Berdasarkan tujuan yang terdapat pada latar belakang tentang mengevaluasi program Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum implementasi program Kredit Usaha Rakyat di kecamatan Alla sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya kenaikan debitur KUR sitem tahunnya serta adanya kepuasan dari debitur KUR mengenai adanya KUR untuk membantu meningkatkan taraf perekonomian dan membantu dalam kelangsungan usaha yang dimiliki.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan KUR di kecamatan Alla Kabupaten Enrekang antara lain:
 1. Faktor Pendukung
 - a. Suku bunga KUR hanya 7%
 - b. Persyaratan sederhana dan tanpa jaminan
 2. Faktor penghambat
 - a. Gagal Usaha

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kredit Usaha rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang” ini, maka peneliti dapat memberikan saran agar dapat melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut sehingga berjalan dengan semestinya. Adapun saran-saran sebagai berikut yaitu :

1. Perlu adanya kerja sama antara pihak bank dengan pihak kecamatan dalam hal mensosialisasikan program ini kepada masyarakat di Kecamatan Alla.
2. Membuka ruang komunikasi public yang baik yang luas agar program kredit usaha rakyat dapat rersosialisasi dengan baik. Agar kejelasan program dapat diketahui oleh calon pengguna KUR.
3. Masyarakat di Kecamatan Alla khususnya bagi masyarakat yang sudah menggunakan KUR untuk membantu dalam mensosialisasikan minimal kepada keluarga atau tetangga agar program ini cepat diketahui oleh masyarakat sehingga dapat mensejahterahkan kehidupan masyarkat di kecamatan Alla.

Daftar Pustaka

- Abdul, K Muhammad dan Rilda, Murniati. 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus, Dwiyanto. 2003. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Anggraini, Anggini. 2013. *Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan di Kota Bandar Lampung*. Tesis: Universitas Lampung.
- Anggraini, Dewi dan Nasution, Syahrir Hakim. 2013. *Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pembangunan UMKM di Kota Medan // Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No 3 Vebruari 2013*.
- Chariri, A dan Ghozali, Imam. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nugroho, Rian. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pitapurwati, Winria. 2014. *Pelaksanaan Penyaluran Raskin di kecamatan Sumororong kabupaten Mamasa*. Skripsi: Universitas Hasanuddin.
- Purwanto, E. Agus dan sulistyastuti, D, Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratminto dan Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedyo, W. A. Try. 2015. *Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Usaha Mikro Kecil dan menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit di Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Kalijaga.

- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, Sultan Remy. 2005. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum*. Jakarta: Pustaka Alfabet
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dtonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Wahab, Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wanggai, V. Velix. 2012. *Pembangunan Untuk Semua*. Jakarta: Bina Graha.
- Wardhana, Aditya dan Iba, Zainuddin. *Analisis Kinerja Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tingkat Propinsi Di Indonesia*. // Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh. Vol. IV No 8. September 2013
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, F. Tayibnapis. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.





FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 0250/A.3-II/I/1440/2019

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Hardiyanti

S t a m b u k : 10561 05492 15

J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

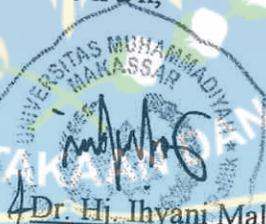
"Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang"

Pembimbing I : Abd Kadir Adys, SH, MM

Pembimbing II : Dr. Sudarmi, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar
Pada Tanggal : 28 Januari 2019
D e k a n,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



Nomor : 1003/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Hardiyanti
Stambuk : 105610549215
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Kalosi dan Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
Judul Skripsi : ***"Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 26 April 2019

Dekan,
Ub. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM. 1084 366



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: 1204/05/C.4-VIII/III/1440/2019
: 1 (satu) Rangkap Proposal
: Permohonan Izin Penelitian

21 Sya'ban 1440 H
26 April 2019 M

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Bupati Enrekang
Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
di -
Enrekang

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1003/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M tanggal 26 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HARDIYANTI**
No. Stambuk : **10561 0549215**
Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 April 2019 s/d 27 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 29 April 2019

Nomor : 180/DPMPSTSP/IP/IV/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Camat Alla
2. BRI Unit Kalosi
Di
Kec. Alla

Berdasarkan surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1204/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 26 April 2019, menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Hardiyanti**
Tempat Tanggal Lahir : Belajen, 17 Maret 1997
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Belajen Barat Kel. Kambiolangi kec. Alla

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 29 April 2019 s/d 27 Juni 2019

Pengikut/Anggota : -

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil kegiatan kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

/s.d. BUPATI ENREKANG
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang



HARWAN SAWATI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
: 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
04. Universitas Muhammadiyah Makassar.
05. Yang Bersangkutan (**Hardiyanti**).

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Wangka selaku pengguna Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.



Wawancara dengan Bapak Aco selaku pengguna Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Alla kabupaten Enrekang.



Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pengguna Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Alla kabupaten Enrekang.



Proses pengambilan data mengenai Kecamatan Alla di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.



Wawancara dengan Ibu Nuraini selaku pengguna Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Alla kabupaten Enrekang.



Wawancara dengan bapak Ketua BRI Unit Kalosi.



Wawancara dengan bapak Ketua BRI Unit Kalosi.



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hardiyanti, lahir pada tanggal 17, Maret 1997 di Enrekang, Penulis merupakan anak ke-tiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri bapak Mustafa dan ibu Maria. Penulis berdomisili di Dusun Belajen Barat, Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Adapun riwayat pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah SDN 176 Belajen lulus tahun 2009, melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di MTs Negeri Alla lulus tahun 2012, selanjutnya melanjutkan sekolah di SMA Muhammadiyah Kalosi lulus tahun 2015. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Administrasi Negara. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program SI Fakultas ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.